

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 mengenai program Rencana Umum Nasional Keselamatan 2021-2040 masing-masing pilar di Kota Bekasi telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana, diantaranya ada beberapa faktor mengapa ada beberapa program RUNK belum terlaksana di Kota Bekasi yaitu karena program tersebut didalam Peraturan Presiden yang baru tahun 2022 serta keterbatasan anggaran dan sosialisasi dari nasional sampai ke daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kota Bekasi. Namun dalam rangka mendukung dan melaksanakan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Program RUNK sebagai upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bekasi, masing-masing pilar di Kota Bekasi terus melakukan perbaikan dan merealisasikan program-program sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2021-2040 yang telah dilakukan di Kota Bekasi mencapai rata-rata 74,2% dengan rincian pencapaian masing-masing pilar: Pilar 1 Bappelitbangda sebesar 66,7%, Pilar 2 DBMSDA sebesar 87,5%, Pilar 3 Dishub sebesar 77,4%, Pilar 4 Kepolisian (Polres) sebesar 62,08%, Pilar 5 Dinkes sebesar 75%.
2. Berdasarkan Analisis Keselamatan mengenai identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dengan menggunakan metode EAN/AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan). Dibagi 3 klasifikasi ruas jalan dengan daerah rawan kecelakaan tertinggi menurut status jalannya. Untuk Jalan Nasional yaitu Jalan Raya Sultan Agung, Jalan Provinsi yaitu Jalan Raya Siliwangi (Narogong), Jalan Kota yaitu Jalan KH Nor Ali.

3. Berdasarkan hasil analisis mengenai ruas jalan daerah rawan kecelakaan di Kota Bekasi menghasilkan rekomendasi penanganan daerah kecelakaan yaitu:

1) Ruas Jalan Raya Siliwangi direkomendasikan untuk perbaikan geometrik jalan, merekomendasikan perkerasan jalan jenis *composite pavement* (campuran beton dan aspal), pelebaran jalan, membuat trotar arah cibubur dan perbaikan trotoar, penertiban pedang pasar dan parkir liar penyebab hambatan samping jalan, pemasangan median pagar jalan, pemasangan dan perbaikan rambu perlengkapan jalan, manajemen kecepatan jalan batas kecepatan 40km/jam dan pita penggaduh, perbaikan dan pengecatan ulang marka jalan serta penambahan *zebra cross*, Perbaikan PJU yang tidak berfungsi, perbaikan paku marka tengah jalan, melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan mematuhi aturan berlalu-lintas dilakukan secara berkala dari pelajar, pekerja, dan supir kendaraan angkutan umum atau barang, melakukan penegakan hukum dan sosialisasi kepada pelaku pengguna jalan pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum secara manual langsung atau secara elektronik (*E-TLE*).

2) Ruas Jalan Raya Sultan Agung

Ruas Jalan Raya Sultan Agung direkomendasikan untuk perbaikan geometrik jalan, mendesain ulang Zona Selamat Sekolah (ZOSS), pemasangan dan perbaikan rambu perlengkapan jalan, manajemen kecepatan jalan batas kecepatan 30km/jam dan pita penggaduh, perbaikan dan pengecatan ulang marka jalan, Perbaikan PJU yang tidak berfungsi, melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan mematuhi aturan berlalu-lintas dilakukan secara berkala dari pelajar, pekerja, dan supir kendaraan angkutan umum atau barang, melakukan penegakan hukum dan sosialisasi kepada pelaku pengguna

jalan pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum secara manual langsung atau secara elektronik (*E-TLE*).

- 3) Ruas Jalan KH Nor Ali direkomendasikan untuk perbaikan geometrik jalan, perlengkapan jalan berupa pemasangan rambu batas kecepatan, pemasangan pita pengaduh, pemasangan warning light, pemasangan marka garis tepi, pemasangan marka garis putus-putus membujur, melakukan upaya penanganan daerah rawan kecelakaan melalui edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dilakukan secara berkala dari pelajar, pekerja, dan supir kendaraan angkutan umum atau barang, melakukan penegakkan hukum melalui operasi kepatuhan secara rutin atau secara elektronik (*E-TLE*).

VI.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Magang Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengenai pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Bekasi, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya forum Keselamatan LLAJ sebagai pengenalan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan memahami akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program-program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
3. Perlu adanya evaluasi dan monitoring dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan mengenai kinerja RUNK untuk menjadi acuan sehingga membentuk peningkatan keselamatan jalan di Kota Bekasi.

4. Perlu adanya penanganan dan perbaikan segera terhadap daerah rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, bahaya sisi jalan, penegakan hukum terhadap pengguna jalan yang melanggar, serta melakukan sosialisasi dan edukasi keselamatan LLAJ.

DAFTAR PUSTAKA

- 2022-2024, K. W. K. B. forum lalu lintas periode. (n.d.). FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BEKASI PERIODE 2022-2024.
- Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. D. K. B. (2020). Pemutakhiran Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi 2021. Wikipedia, 10(1), 390–400.
- Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. D. K. B. (2021a). ALBUM PETA Pemutakhiran Rencana Kota Bekasi.
- Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. D. K. B. (2021b). Laporan Pendahuluan Pemutakhiran Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2016). Profil Kota Bekasi. Profil Kabupaten/Kota, 144.
<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jabar/bekasi.pdf>
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2020). Kota Bekasi Dalam Angka 2021. BPS Kota Bekasi, 346.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005>
<http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757>
- BADAN STANDARISASI NASIONAL. (2004). Rsn-Geometri Jalan Perkotaan. Handbook of Pediatric Retinal OCT and the Eye-Brain Connection, 285–287.
- Barus, T. A. (2004). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS DENGAN. XI(2), 64–72.
- Bekasi, D. P. K. (2015). LAPORAN PENERIMAAN PAD SEKSI PENGUJIAN SARANA Periode 2015 - 2022. 1(1), 2015.
- BEKASI, P. K. (2021). DATA PERALATAN UJI. In PENGUJIAN KOTA BEKASI (Vol. 26, Issue 2). <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Bekasi, W. (2013). PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 6, 1–20.
- Bekasi, W. K. (2022). KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA BEKASI.
- Bina Marga. (2010). Spesifikasi umum 2010. Direktorat Jendral Bina Marga, 2010(Revisi 3), 1–6.

- BPS. (2022). Kota Bekasi Dalam Angka 2022. BPS Kota Bekasi, 295.
- BPS Kota Bekasi. (2021). EKSEKUTIF SUMMARY KOTA BEKASI 2021. In BPS Kota Bekasi.
- Dinas Kesehatan. (2019). Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan. In Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan: Vol. (Issue).
- Dinas Kesehatan. (2023). RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018-2023.
- Direktorat Jendral perhubungan. (2015). PM_111_Tahun_2015.pdf.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2022). Pu.go.id. https://binamarga.pu.go.id/index.php/konten/ebook_show/?files=uploads/files/1235/3d7aefbb9548e6578a8451f7d6301b11.pdf
- Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Rencana Kerja Tahun 2022.
- Dirjen Perhubungan Darat. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK. 407/AJ.401/DRJD/2018 (p. 47). http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VTBzdU5EQTNMMEZLTGpRd01TOUVVa3BFTHpJd01UZz0=
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). PROFIL KESEHATAN KOTA BEKASI TAHUN 2020.
- Harun Rasyid. (2022, June 18). Target Penurunan Angka Kecelakaan Sulit Tercapai, Tiga Jiwa Meninggal Setiap Jam, Berikut Lapornya. Gridoto.Com; Gridoto.Com. <https://www.gridoto.com/read/223334221/Target-Penurunan-Angka-Kecelakaan-Sulit-Tercapai-Tiga-Jiwa-Meninggal-Setiap-Jam-Berikut-Laporannya>
- Hendrawati, R. (2021). Berita Daerah Kota bekasi. KeputusanPeraturan45 Tahun 2019, 1-9. <https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/2021pw322357.B.pdf>
- Ibrahim, M. (2020). Indonesia Supports Decade Of Action For Road Safety. Dephub.Go.Id. <https://dephub.go.id/post/read/indonesia-dukung-dekade-aksi-keselamatan-jalan-5130>
- Jasaraharja Indonesia. (2014). Pt Jasa Raharja - Detail. Jasaraharja.Co.Id. <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>
- Jdih - Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pupr. (2018). Pu.Go.Id. <http://jaffry.prabu.prakoso.com>, & Saeno. (2018, March 4). Kerugian Negara Akibat Kecelakaan 2,9%-3,1% Dari Pdb. Bisnis.Com; Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180304/98/745699/kerugian-negara-akibat-kecelakaan-29-31-dari-pdb>
- Jaffry Prabu Prakoso, & Saeno. (2018, March 4). Kerugian Negara Akibat

Kecelakaan 2,9%-3,1% Dari Pdb. Bisnis.Com; Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180304/98/745699/kerugian-negara-akibat-kecelakaan-29-31-dari-pdb>

INDONESIA, M. P. R. (2015). PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 26 TAHUN 2015. *Teaching and Teacher Education*, 12(1), 1–17.
<http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581>
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en>
<http://europa.eu/>
<http://www.leg.state.vt>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, & PERUMAHAN, R. D. (2018). Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Kementerian PUPR, 1–43.

Laporan Penerimaan Pad Seksi Pengujian Sarana Periode 02 Januari 2015 S . D 30 Desember 2015 Laporan Penerimaan Pad Seksi Pengujian Sarana Periode 04 Januari 2016 S . D 30 Desember 2016 Laporan Penerimaan Pad Seksi Pengujian Sarana Periode 02 Januari 2017. (2015). 1(1), 2015.

Modul, Kebijakan, Berkeselamatan, J., Pengantar, K., Pusat, K., Dan, P., Jalan, P., Pengembangan, D., & Wilayah, I. (N.D.). Retrieved December 6, 2022, From https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/01/cf9bc_1-kebijakan_jalan_berkeselamatan__an_.pdf

MENTERI PEKERJAAN UMUM. (2011). PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 19/PRT/M/2011. July, 1–7.

Pemerintah Indonesia. (2017). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 1–33.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang RUK. 2(134192).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2010). PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, Nomor : 11 /PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN. 1, 105–112.

PERHUBUNGAN, K. (n.d.-a). PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (Issue 021).

PERHUBUNGAN, K. (n.d.-b). SURAT PANGGILAN DIKLAT PKB DASAR 2021.

PRESIDEN, K. (1971). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 54 TAHUN 1971 TENTANG. 379(1), 350–379.

Pp No. 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara [Jdih Bpk Ri]. (2014). Bpk.Go.Id. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/69501/Pp-No-46-Tahun-1971>

Pusat, K., Dan, P., Jalan, P., Pengembangan, D., & Wilayah, I. (N.D.). https://Simantu.Pu.Go.Id/Epel/Edok/7e41e_10-Audit_Keselamatan_Jalan__Ds_.Pdf

Sitimustarohmah. (2015, July 2). 2007_Pedoman Operasi Investigasi Blackspot_Hubdat. Fdokumen.Com; Unknow. <https://Fdokumen.Com/Document/2007pedoman-Operasi-Investigasi-Blackspothubdat.Html?Page=1>

Transportasi, I., & Gambar, D. (2021). Album Peta Pemutakhiran Rencana Kota Bekasi.

Utama, aditia edy. (2017). KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 620/Kep.386 – DinasPUPR/VIII/2017.